

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dunia dapat dilihat sebagai kumpulan daerah, setiap daerah mempunyai sistem pengolahan sumber daya alam, tenaga kerja, produksi yang merata, kegiatan memperkembangkan sektor kegiatan didaerah tersebut. Setiap daerah berusaha mencukupi kebutuhannya dan berusaha mengembangkan daerahnya secara maksimum.

Besaran lain yang dapat dipakai sebagai ukuran dasar adalah pendapatan nilai tambah, jumlah penduduk, luas tanah, penggunaan besaran sebagai ukuran mempunyai penafsiran berbeda-beda, yaitu (*Isard, 1969*) yang dikutip (*Warpani, 1984*)

- § Pendapatan, merupakan besaran yang digunakan bila kita tertarik pada satuan industri daerah berbanding dengan daya produksi buruh secara keseluruhan.
- § Nilai tambah, digunakan bila kita tertarik pada satuan industri daerah berbanding dengan daya produksi buruh secara keseluruhan.
- § Penduduk, digunakan bila yang dipersoalkan adalah keadaan dan kriteria kesejahteraan dan keseimbangan pembagian perkapita.
- § Area/kawasan (luas tanah), digunakan bila yang menjadi perhatian adalah persoalan kemampuan perubahan guna lahan.
- § Tenaga kerja pada industri sekunder, digunakan bila ingin menguji hipotesis orientasi suatu industri.

Salah satu perwujudan hubungan antara daerah ialah adanya pertukaran daerah itu yang dapat berwujud barang uang maupun jasa, lebih dari itu dapat diketahui tingkat ketergantungan daerah yang diselidiki pada daerah lain atau peranan daerah yang diselidiki atau daerah lain yang lebih luas. Pengiriman hasil produksi dari daerah pertama ke daerah kedua berarti menuntut imbalan dari daerah kedua ke daerah pertama yang berbentuk aliran uang (*Isard, 1969*).

Ada beberapa aspek yang turut menentukan keberhasilan suatu program, dimana untuk program pertanian menurut (*Soekartiw, 2002*) menjelaskan bahwa aspek sumber daya, aspek kelembagaan, dan aspek penunjang pembangunan

pertanian merupakan suatu kesatuan untuk mendukung suatu program pengembangan pertanian, dijelaskan lebih lanjut mengenai tiga itu meliputi :

1. Aspek Sumber Daya

Faktor produksi alam dan tanah : luas lahan, penggunaan lahan, topografi lahan dan kesuburan lahan pertanian.

§ Faktor produksi modal : memperbesar simpanan, pajak dan pembentukan modal oleh pemerintah.

§ Faktor produksi tenaga kerja

§ Manajemen

2. Aspek Kelembagaan

§ Lembaga keuangan, seperti bank untuk petani mendapatkan kredit dan menabung.

§ Lembaga penyuluhan dilengkapi dengan petugasnya yang disebut PPL

§ Lembaga penyaluran sarana produksi, seperti bibit, pupuk dan obat-obatan dari distributor hingga kepada KUD yang selanjutnya dipasarkan kepada petani.

§ Lembaga yang mampu membeli hasil pertanian yang diproduksi petani, seperti KUD yang ditugaskan untuk menampung hasil produksi pertanian.

3. Aspek penunjang pembangunan pertanian adalah kebijaksanaan infrastruktur, kebijaksanaan irigasi, program intensifikasi, padat karya, subsidi desa dan KUD dan program pedesaan lainnya.

Sebagian dari pembangunan regional/nasional dan pembangunan sektor pertanian, pembangunan sub sektor perkebunan telah memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan petani, peningkatan pendapatan ekspor, pemenuhan bahan industri dalam negeri, pemerataan pembangunan, pengembangan wilayah, penanganan wilayah tertinggal, penyebaran penduduk, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

Sub sektor perkebunan meskipun kontribusinya terhadap PDRB sangat kecil namun peranannya tidak dapat diabaikan, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sub sektor perkebunan dapat menyerap banyak tenaga kerja, karena yang dikelola adalah tanaman hidup yang sulit digarap secara mekanis terutama tanaman keras/tahunan
- Sebagai penghasil komoditi ekspor sub sektor perkebunan menduduki urutan ke tiga setelah sub sektor pertambangan minyak dan gas serta kehutanan, berbeda dengan minyak dan gas bumi perkebunan merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui.
- Sub sektor perkebunan merupakan sumber energi bagi manusia pengolahan hasil perkebunan industri tradisional maupun bagi rumah tangga pedesaan.
- Peranan perkebunan dalam pelestarian alam (dalam arti pengawetan tanah dan air) maupun penciptaan lingkungan hidup selama ini sejalan dengan itu maka kegiatan sub sektor perkebunan selain sehat dalam kawasan yang luas.

2.1 Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

A. Pembangunan Ekonomi Wilayah

Negara terbelakang yang berhasrat maju harus memenuhi prasyarat – prasyarat dasar bagi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dicapai semata – mata dengan menyingkirkan hambatan yang menghalangi kemajuan ekonomi (*Jhingan, 1994*).

Menurut (*Jhingan 1994*), Pengertian pembangunan (*development*) berbeda dengan pertumbuhan (*growth*). Adapun yang dimaksud pembangunan ekonomi (*economic development*) tidak hanya mempersoalkan output yang dihasilkan dan didistribusikan, tetapi juga perubahan komposisi output dalam sektor-sektor ekonomi, tetapi pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan “kekayaan manusia, sikap sosial, kondisi politik dan latar sejarah” maka kondisi ekonomi saja tidaklah cukup. Kondisi politik, psikologi, sosial dan budaya merupakan syarat yang sama pentingnya dengan kondisi ekonomi.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat – syarat dari pembangunan ekonomi, yaitu:

1. Atas Dasar Kekuatan Sendiri

Proses pertumbuhannya harus bertumpu pada kemampuan perekonomian di dalam negeri. Pembangunan harus diprakarsai oleh negara dan tak dapat dicangkokkan dari luar.

2. Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar

Ketidaksempurnaan pasar menyebabkan immobilitas faktor dan menghambat ekspansi sektoral, dan pembangunan. Untuk menghilangkan hal ini, lembaga sosio – ekonomi yang ada harus diperbaiki dan diganti dengan yang lebih baik. Tujuan perekonomian yang demikian adalah penggarapan secara maksimum dan penggunaan secara efisien sumber – sumber yang ada.

3. Perubahan Struktural

Perubahan struktural semacam ini menyebabkan kesempatan kerja semakin banyak, dan produktivitas buruh stok modal, pendayagunaan sumber – sumber baru serta perbaikan teknologi akan semakin tinggi.

4. Pembentukan Modal

Merupakan faktor yang paling penting dan strategis di dalam proses pembangunan ekonomi. Pembentukan modal bahkan disebut sebagai “kunci utama menuju pembangunan ekonomi”.

5. Kriteria Investasi Yang Tepat

6. Persyaratan Sosio – Budaya, dan

7. Administrasi.

B. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah perkembangan output per unit input. Sedangkan yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi diwilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi diwilayah tersebut. Pertambahan pendapatan diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Hal itu juga sekaligus menggambarkan balas jasa bagi faktor – faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah,

modal, tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut (*Tarigan, 2005*).

Menurut (*Boediono dalam Tarigan, 2005*), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* itu harus lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut.

Menurut (*Lewis dalam Jhingan, 1994*), pendorong utama pertumbuhan ekonomi ialah upaya untuk berhemat (ekonomis), peningkatan pengetahuan dan penerapannya di bidang produksi, dan peningkatan jumlah modal atau sumber lain per kepala. Tiga pendorong ini, meski secara konsep dapat dibedakan, namun biasanya nampak berbarengan.

Pertumbuhan ekonomi bukanlah suatu proses sederhana berupa peningkatan volume modal per kepala tetapi juga merupakan hasil pengubahan pandangan masyarakat dan lembaga perkenomian (*Jhingan, 1994*).

2.1.1 Teori – Teori Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Pertanian

Pembangunan ekonomi dengan pemberian prioritas pada sektor pertanian bukan hanya kasus yang terjadi di Negara Indonesia terutama di Kecamatan Soreang saja, tetapi merupakan garis kebijaksanaan yang mulai populer sejak awal tahun enam puluhan.

Pembangunan pertanian didorong dari segi penawaran dan dari segi fungsi produksi melalui penelitian – penelitian, pembangunan teknologi pertanian yang terus menerus, pembangunan prasarana sosial dan ekonomi di pedesaan dan investasi – investasi oleh suatu negara dalam jumlah besar. Pertanian di suatu wilayah kini dianggap sebagai sektor pemimpin (*leading sector*) yang diharapkan mendorong perkembangan sektor – sektor lainnya.

Untuk keberhasilan suatu pembangunan pertanian diperlukan beberapa syarat atau pra – kondisi untuk setiap daerah. Pra – kondisi tersebut meliputi bidang teknis, sosial budaya dan lain – lain. Menurut (*A. T Mosher dalam Myrna, 2005*), menjelaskan bahwa Mosher telah menganalisa syarat – syarat mutlak

dibanyak negara dan menggolongkannya menjadi syarat mutlak dan syarat pelancar.

Menurut *Mosher* ada lima (5) syarat yang tidak boleh dihilangkan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Syarat – syarat mutlak tersebut adalah:

1. Adanya pasar untuk hasil – hasil usaha tani;
2. Teknologi yang senantiasa berkembang;
3. Tersedianya bahan – bahan dan alat – alat produksi secara lokal;
4. Tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinu.

Selain syarat – syarat mutlak, terdapat syarat – syarat yang tidak mutlak tetapi jika ada benar – benar sangat memperlancar pembangunan pertanian. Syarat – syarat tersebut adalah:

1. Pendidikan Pembangunan;
2. Kredit produksi;
3. Kegiatan gotong – royong petani;
4. Perencanaan sosial pembangunan pertanian.

Menurut (*Hanani, Ibrahim, Purnomo, 2003*), dalam mengembangkan usaha pertanian kegiatan utama yang harus dilakukan peningkatan produksi barang pertanian serta mendorong petani, meningkatkan produktifitas pertanian serta mendorong pengembangan komoditas yang sesuai dengan potensi wilayah. Kualitas dan kuantitas yang baik dari produk pertanian yang dihasilkan petani sangat mempengaruhi pendapatan petani. Pasarpun sangat menuntut kualitas produk sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran dan tingkat pendapatan masyarakat.

Syarat – syarat dalam pengembangan pertanian yaitu:

1. Kelestarian Lingkungan

Pertanian merupakan usaha yang sangat tergantung pada alam. Iklim dan lahan merupakan komponen utama yang mempengaruhi keberhasilan usahatani. Kelestarian alam merupakan upaya yang harus dilakukan petani agar usahatannya berhasil dan berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pengembangan pola – pola usahatani terpadu diantara komoditi pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan. Sebagai contoh

pengusahaan pertanian tanaman pangan didukung oleh usaha peternakan dengan menyediakan bahan organik bagi lahan.

2. Dukungan Kelembagaan Agribisnis

Dari sisi pengelolaan, pengembangan pertanian selama ini belum terpola. Struktur pertanian yang diperlukan dan dikembangkan adalah struktur pertanian industrial (proses konsolidasi usahatani disertai dengan koordinasi secara vertikal) yang memungkinkan terjadinya hubungan fungsional saling menguntungkan di antara pelaku pertanian. Kegiatan yang diperlukan dalam membangun struktur pertanian industrial tersebut antara lain: (i) pengembangan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku pertanian terutama petani dalam kewirausahaan agribisnis, (ii) peningkatan pelayanan usaha agribisnis, (iii) pengembangan kelembagaan usaha seperti organisasi petani, kemitraan, kelembagaan pemasaran, koperasi pertanian, dan kelompok usaha lain, dan (iv) pengembangan kemampuan pelayanan seperti penyuluhan, informasi pasar, lembaga finansial dan lainnya.

3. Teknologi Strategis Berbasis Lokal

Hal lain yang sangat penting dalam mengembangkan teknologi berbasis lokal adalah tunjangan kelembagaan teknologi.

4. Pendayagunaan dan Perlindungan Sumberdaya Hayati

Indonesia mempunyai keanekaragaman sumberdaya hayati dan kekayaan alami yang besar mencakup tanaman pangan, hortikultura, tanaman industri, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Keanekaragaman yang melimpah tersebut masih bersifat semu karena baru berupa potensi, sedangkan kemampuan untuk menggali, memanfaatkan dan mengembangkan berdasarkan teknologi mutakhir, belum optimal. Dengan ketersediaan sumberdaya hayati yang lengkap dan aman maka berbagai kegiatan pendukung dalam mengembangkan teknologi dan perluasan tanaman dapat dengan aman dilakukan.

5. Sistem Informasi Yang Tangguh.

Pengembangan sistem informasi pertanian memerlukan dukungan data yang akurat, sistem informasi dan layanan data dan informasi pertanian yang baik.

Dengan sistem informasi yang baik akan dapat dilakukan pemantauan dan penyebarluasan informasi pertanian secara cepat, akurat dan murah.

2.1.2 Prinsip – Prinsip Ekonomi Dalam Usaha Tani

Istilah **intensifikasi** banyak sekali digunakan di negara kita dan menjadi sangat populer terutama dalam hubungan usaha peningkatan produksi padi. Intensifikasi dimaksudkan penggunaan lebih banyak faktor produksi tenaga kerja dan modal atas sebidang tanah tertentu untuk mencapai hasil produksi yang lebih besar.

Sebaliknya **ekstensifikasi** pada umumnya diartikan sebagai perluasan pertanian dengan cara mengadakan pembukaan tanah – tanah pertanian baru. Pengertian ekstensifikasi yang demikian sebenarnya tidak tepat karena ditekankan pada akibat baru atau konsekuensi dari pengerjaan tanah yang tidak intensif. Kalau dalam pengerjaan tanah yang makin intensif petani terus menerus menambah tenaga modal atas tanah yang sudah ada maka dalam pengerjaan tanah yang ekstensif penggunaan tenaga dan modal dikurangi untuk dipindahkan ke tanah pertanian lainnya (*Mubyarto, 1889*).

Terdapat beberapa sebab ekonomi mengapa usahatani memproduksi lebih dari satu komoditi saja atau usaha bagian (*enterprise*). Bagi petani yang mengusahakan tanaman tumpangsari di Kecamatan Soreang tujuan utamanya adalah mendapatkan hasil produksi yang optimal dari sawah atau ladang. Selain itu karena umur tanaman – tanaman yang bersangkutan tidak sama, maka ini berarti menjamin tersedianya bahan makanan sepanjang tahun. Dengan cara ini resiko dapat dikurangi. Kalau satu macam tanaman tidak berhasil maka diharapkan tanaman lainnya akan memberikan hasil. Alasan untuk mengurangi resiko kerugian dengan semacam **diversifikasi** ini merupakan praktek yang biasa bagi petani yang memang biasanya tidak berdaya menghadapi kekuatan – kekuatan alam yang tidak dapat dikontrolnya.

Dengan adanya keperluan petani yang beraneka ragam, hasil – hasil produksi petani dijual untuk ditukarkan dengan hasil – hasil produksi pertanian lainnya yang dihasilkan keluarga lain dan akhirnya timbullah **spesialisasi**.

Perdagangan merupakan akibat logis dari adanya spesialisasi antar daerah yang merupakan faktor ekonomi yang sangat penting.

Adanya spesialisasi dalam produksi pertanian antar daerah yang satu dengan daerah yang lain yang menimbulkan perdagangan dapat diterangkan secara sederhana dengan teori **keuntungan absolut** (*law of absolute advantage*) dan teori **keuntungan komparatif** (*law of comparative advantage*). Prinsip keuntungan absolut adalah suatu negara akan berspesialisasi dalam produksi barang di mana negara tersebut mempunyai *absolute advantage*.

Apabila spesialisasi dijalankan terlalu jauh, maka suatu daerah tertentu dapat menjadi terlalu tergantung pada satu jenis hasil pertanian saja. Dalam berbagai daerah nampaknya baik spesialisasi maupun diversifikasi masing – masing mempunyai tempat dan pertimbangan sendiri – sendiri. Adapun faktor – faktor yang mendorong spesialisasi bagi suatu daerah dapat berupa:

1. Tidak adanya sumber – sumber alam yang berarti;
2. Keuntungan komparatif yang tinggi dalam suatu produk, baik dalam persediaan bahan baku maupun dalam permodalan dan keterampilan manusia;
3. Hubungan transpor dan komunikasi yang cukup baik dengan daerah – daerah lain sehingga keburukan – keburukan spesialisasi tidak perlu tumbul;
4. Industri pertanian yang bersangkutan memungkinkan pembagian kerja yang baik dengan daerah – daerah sekitarnya, sehingga membawa keuntungan secara nasional.

Sebaliknya ada faktor – faktor lain yang membenarkan kecenderungan ke arah diversifikasi, antara lain:

1. Prospek jangka panjang yang kurang menentu dari satu hasil utama;
2. Tersedianya sumber – sumber alam lain yang mempunyai prospek yang baik dan permintaan yang lebih elastis;
3. Biaya transpor yang tinggi dalam ekspor – impor antar daerah.

Spesialisasi tidak hanya pada satu hasil pertanian saja tetapi pada dua atau tiga, sedangkan diversifikasi juga tidak dijalankan terlalu jauh tetapi hanya pada beberapa hasil pertanian yang benar – benar dapat diusahakan dengan cukup menguntungkan (*Mubyarto, 1989*).

2.2 Kajian Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi sosial ekonomi, budaya, geografis yang sangat berberda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Pada dasarnya pengembangan wilayah harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan permasalahan wilayah bersangkutan.

Perencanaan pengembangan wilayah adalah perencanaan yang merumuskan atau menyusun strategi pengembangan/pembangunan wilayah untuk masa yang akan datang (*G.P. Houlder, 1994*)

Suatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan yang terdapat pada wilayah tersebut. Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah terdiri atas aspek fisik, sosial, ekonomi, sarana dan prasarana yang terdapat diwilayah tersebut, selain itu perkembangan suatu wilayah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut maka perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut agar dapat diketahui potensi yang terdapat diwilayah tersebut yang dapat dimanfaatkan dengan efisien dan efektif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah tersebut, serta mengurangi kesenjangan yang terjadi antara bagian wilayah yang satu dengan yang lainnya.

Permasalahan klasik yang biasanya terjadi pada suatu wilayah yaitu berupa ketidakmerataan perkembangan yang terdapat diwilayah tersebut, dimana ketidakmerataan akan terlihat pada bagian wilayah yang satu yang mengalami perkembangan yang lebih baik dibandingkan bagian wilayah yang lain yang cenderung mengalami keterhambatan dalam perkembangannya, sehingga hal ini dapat menimbulkan adanya kesenjangan antara bagian wilayah yang satu dengan bagian wilayah lainnya.

Konsep pengembangan wilayah di Indonesia dikembangkan pula oleh Dr.Ir.Poernomosidi Hadjisarosa melalui pendekatan satuan-satuan wilayah pengembangan (SWP). Pendekatan ini bertumpu pada *market area* dari *losch*

dengan membagi wilayah nasional ke dalam beberapa SWP. Setiap SWP didukung oleh kota-kota yang berhirarki pada satu satuan wilayah maupun secara keseluruhan pada ruang nasional. Pendekatan ini akhirnya sangat mewarnai penentuan orde kota dan hirarki jalan dalam wilayah nasional (*Dodi Slamet Riyadi, 2002*).

Kecenderungan perkembangan wilayah di Indonesia pada umumnya secara keseluruhan dapat dilihat bahwa pertumbuhan wilayah bagian barat lebih berkembang dibandingkan dengan perkembangan wilayah bagian timur Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari kelengkapan sarana dan prasarana di bagian wilayah barat lebih memadai dibandingkan bagian timur sehingga lebih menunjang terhadap perkembangan wilayah bagian barat, dimana aktivitas perekonomian lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah timur, sehingga dapat dikatakan perkembangan wilayah Indonesia secara keseluruhan terdapat kesenjangan antara wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur.

2.2.1 Peran Sektor Perkebunan Dalam Perekonomian

Pengembangan dan pembangunan perekonomian suatu wilayah diawali dengan melakukan analisis terhadap struktur dan tingkat kinerja kegiatan ekonomi atau perekonomian wilayah yang bersangkutan. Analisis ini berguna untuk mengetahui karakteristik dari struktur perekonomian yang ada dalam suatu wilayah serta mengetahui pertumbuhan atau kemampuan tumbuh kembang perekonomian wilayah dari tahun-ketahun, serta peran dari masing-masing sektor ekonomi pada suatu wilayah, sehingga dapat mengenali sektor unggulan yang dapat dikembangkan sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah.

Peran sektor unggulan dalam usaha pengembangan dan pembangunan ekonomi wilayah ditujukan guna mengatasi keterbatasan dana dan sumber daya serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk dapat melaksanakan pembangunan dan pengembangan kota yang optimal dan dalam rangka optimasi dan efisiensi pembangunan perekonomian daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan. Dalam lingkup pengarahannya pembangunan diperlukan adanya suatu prioritas. Penentuan prioritas

pembangunan dapat didasarkan kepada suatu pendapat yang menyangkut bahwa pertumbuhan dari suatu wilayah akan dapat dioptimalkan apabila kegiatan pembangunan dapat dikonsentrasikan pada aktivitas-aktivitas sektor ekonomi yang dapat memanfaatkan kekuatan atau kelebihan yang secara alamiah dimiliki oleh wilayah yang bersangkutan (*Syafizai, 1985*).

Penentuan prioritas pembangunan diperlukan karena adanya keterbatasan dalam hal waktu, pendanaan, tenaga, dan sumber daya yang tersedia. Salah satu cara untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah adalah dengan cara melakukan kajian dan analisis terhadap kegiatan perekonomian atau sektor ekonomi unggulan yang ada guna mengetahui kemampuan kinerja serta tumbuh kembang dari masing-masing sektor ekonomi. Kemampuan tumbuh kembang pada salah satu sektor ekonomi akan menjadi faktor penunjang dan penentu atau pemacu dari pertumbuhan sektor yang lainnya. Salah satu faktor terpenting didalam pengembangan wilayah adalah pertumbuhan perekonomian wilayah dengan cara mengembangkan sektor-sektor unggulan yang ada.

Pemahaman terhadap struktur ekonomi wilayah menjadi hal yang sangat penting untuk dapat menilai permasalahan dan potensi serta peluang yang dimiliki oleh suatu wilayah atau daerah yang bersangkutan. Suatu gambaran yang komprehensif mengenai struktur ekonomi wilayah sangat bermanfaat dalam perencanaan wilayah (*Sitohang, 1977*). Francois Perroux mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah disebabkan oleh adanya berbagai kegiatan industri dalam suatu daerah, perkembangan yang terjadi pada kutub-kutub pertumbuhan akan menyebar sepanjang saluran-saluran yang beraneka ragam dengan efek yang beragam pula terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian (*Sitohang, 1977*). (*Boundeville, 1966*), mengemukakan bahwa setiap wilayah mempunyai perbedaan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia pada wilayah tersebut. Sementara cara untuk menyebarkan pertumbuhan ekonomi dengan memiliki kutub pertumbuhan yang akan mendorong efek kumulatif kegiatan ekonomi dan menyebarkan ke *hinterland*, kemampuan suatu sektor kegiatan untuk menyebabkan pertumbuhannya tergantung *multiplier effect* yang dibuatnya seperti tenaga kerja dan pendapatan.

Seperti diungkapkan tersebut diatas menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki kekuatan atau kelebihan berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang berbeda yang secara alamiah dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan sektor unggulan tiap daerah akan berbeda-beda. Daerah pedesaan biasanya akan menitik beratkan kegiatan ekonominya pada sektor tersier (pertanian), daerah perkotaan biasanya menitik beratkan kegiatan pada kegiatan sekunder (industri) dan sektor kegiatan tersier (jasa).

2.2.2 Peran Sektor Perkebunan Dalam Pengembangan Wilayah

Proses pengembangan wilayah mencakup dua hal pokok yaitu : (*Sujarto, 1997/1998*)

1. Pengembangan wilayah secara substansial yaitu yang mencakup usaha dan perencanaan pengembangan sosial budaya seperti perkembangan penduduk, peningkatan penduduk, peningkatan pendidikan, kesehatan, pelayanan masyarakat, kesejahteraan sosial, kesejahteraan ekonomi seperti peningkatan pendapatan masyarakat dan kemampuan daya beli, produktivitas wilayah, distribusi produksi, fisik seperti perumahan, utilitas umum, prasarana dan sarana perangkutan. Serta politik seperti pelaksanaan pemerintah dan peraturan perundangan, kinerja keikutsertaan masyarakat di dalam pelaksanaan tatanan bangsa dan negara dan keamanan yaitu ketenangan melaksanakan kiprah kehidupan, ketentraman lingkungan dan tidak adanya keresahan masyarakat.

A. Pusat Pelayanan

Pusat pelayanan merupakan titik-titik pertumbuhan yang terjadi di beberapa tempat tertentu saja karena adanya kekuatan penggerak pembangunan, dimana kekuatan tersebut dapat merangsang kegiatan-kegiatan lainnya untuk tumbuh dan berkembang. Kegiatan-kegiatan tersebut mempunyai kecenderungan untuk mengelompok membentuk suatu kesatuan yang pada akhirnya menjadi pusat dari kegiatan atau disebut sebagai pusat pelayanan (*Pengembangan Pusat-Pusat Pelayanan di Banyuwangi : Tugas Akhir, Dep. Teknologi ITB, Bandung, 1984*) jadi, pusat-pusat pelayanan merupakan suatu aglomerasi dari berbagai

kegiatan atau aktivitas serta aglomerasi dari berbagai prasarana dan sarana yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan kota.

Suatu ciri umum dari daerah-daerah nodal adalah bahwa penduduk kota tidaklah tersebar secara merata diantara pusat-pusat yang sama besarnya tetapi tersebar diantara pusat-pusat yang besarnya berbeda-beda yang secara keseluruhan membentuk suatu hirarki perkotaan (*urban hierarchi*) (*Harry W, 1991*).

Struktur dan hirarki pusat pelayanan pada dasarnya ialah suatu arahan mengenai jenjang atau hirarki pusat pelayanan yang ditentukan berdasarkan fungsi dan skala/lingkup pelayanan yang dikembangkan pada masing-masing pusat pelayanan. Pembentukan atau pengadaan pola pelayanan kota yang baik dan efisien adalah mempertimbangkan pola pendistribusian pusat-pusat pelayanan yang mencakup penghirarkian dan mengatur penempatannya secara ruang (*Djoko Sujarto 1977*).

Secara garis besar ada 2 faktor yang sangat berpengaruh didalam penentuan dan pendistribusian pusat pelayanan yaitu faktor manusia yang akan mempergunakan pusat-pusat pelayanan tersebut dan faktor lingkungan tempat manusia tersebut melaksanakan kegiatan hidupnya.

Faktor manusia terutama menyangkut pertimbangan-pertimbangan mengenai jumlah penduduk yang akan mempergunakan pelayanan tersebut, kepadatan penduduk, perkembangan penduduk, keadaan sosial ekonomi masyarakat, potensi masyarakat, dsb. faktor lingkungan terutama menyangkut pertimbangan mengenai skala lingkungan dalam arti fungsi dan peranan sosial ekonominya, jaringan pergerakan, letak geografis lingkungan dan sifat keterpusatan lingkungan.

B. Kegiatan

Sektor perkebunan meskipun kontribusinya terhadap PDRB sangat kecil namun peranannya tidak dapat diabaikan, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ✚ Sektor perkebunan dapat menyerap banyak tenaga kerja, karena yang dikelola adalah tanaman hidup yang sulit digarap secara mekanis terutama tanaman keras/tahunan

- ✚ Sebagai penghasil komoditi ekspor sektor perkebunan menduduki urutan tiga setelah sektor pertambangan minyak dan gas serta kehutanan, berbeda dengan minyak dan gas bumi perkebunan merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui
- ✚ Sektor perkebunan merupakan sumber energi bagi manusia pengolahan hasil perkebunan industri tradisional maupun bagi rumah tangga pedesaan.
- ✚ Peranan perkebunan dalam pelestarian alam (dalam arti pengawetan tanah dan air) maupun penciptaan lingkungan hidup selama ini sejalan dengan itu maka kegiatan sektor perkebunan selain sehat dalam kawasan yang luas.

C. Infrastruktur

Sarana transportasi dan komunikasi menentukan keadaan seluruh interaksi. Sangat sedikit pertukaran barang dapat terjadi tanpa komunikais antar manusia. Dalam hal ini penekanannya diletakkan pada transportasi (*Adisasmita, 2005*).

Pada tingkat wilayah angkutan jalan raya merupakan metoda yang paling banyak digunakan untuk pemindahan manusia dan barang. Keadaan jalan desa bermacam-macam, ada yang terdiri dari aspal, batu tanah keras dan ada yang merupakan jalan setapak. Menurut fungsinya, pada umumnya jalan di desa merupakan jalan lokal. Selama musim hujan tidak jarang terjadi bahwa beberapa jalan tersebut tidak dapat dilalui. Sarana angkutan yang dominan ke pusat-pusat kecil adalah berjalan kaki dan sepeda. Akan tetapi dewasa ini sudah banyak digunakan sepeda motor. Untuk pusat-pusat yang lebih tinggi ordenya sebagian besar penduduk telah menggunakan jasa angkutan kendaraan bermotor roda empat (bis kecil, pick up dan truck) (*Adisasmita, 2005*).

2.2.3 Pengembangan Komoditas Unggulan Dalam Kegiatan Pengembangan

Wilayah

Secara umum dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada era Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I) pembangunan perkebunan dinilai telah berhasil mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, seperti pertumbuhan produk domestik bruto, perkembangan areal, perkembangan

produksi maupun pendapatan ekspor. Pencapaian tersebut dimungkinkan karena didukung dengan berbagai kesiapan, seperti kemampuan sumber daya teknologi, dan dukungan sarana serta prasarana yang merupakan modal untuk penyelenggaraan pembangunan perkebunan

Dalam masa mendatang, pembangunan bidang perkebunan akan tetap memegang peran strategis dalam perekonomian nasional, khususnya sebagai sumber pendapatan petani, penyedia bahan baku industri, penerimaan ekspor, pengembangan wilayah, penyerapan tenaga kerja serta kemampuan dalam mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Dalam kondisi kritis yang dialami bangsa Indonesia semenjak pertengahan tahun 1997, telah menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Dalam kondisi dimana sektor lainnya sedang mengalami kesulitan untuk dapat menyesuaikan diri terhadap gejolak perekonomian yang terjadi, bidang perkebunan menjadi salah satu andalan dalam mendukung kesinambungan pembangunan nasional. Peranan tersebut semakin penting karena perkebunan merupakan sektor yang berbasis sumber daya alam yang tanpa atau relative tidak tergantung pada komponen impor.

Pembangunan perkebunan yang dilaksanakan selama ini ditempuh melalui empat pola pengembangan, yaitu pola PIR (Perkebunan Inti rakyat), pola UPP (Unit Pelayanan Pengembangan), pola swadaya dan pola Perkebunan Besar telah menunjukkan berbagai kemajuan, baik dalam luas areal, produksi, ekspor maupun pendapatan petani. Kemajuan yang dicapai tersebut masih akan dapat ditingkatkan lagi dengan masih terbukanya potensi dan peluang pengembangan.

§ **Tantangan, Kendala dan Peluang Perkebunan**

Berbagai tantangan dan kendala ditemui dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan. Tetapi melekat dengan tantangan itu terdapat juga berbagai peluang usaha. Secara ringkas tantangan, kendala dan peluang pengembangan perkebunan disampaikan dalam uraian berikut.

1. Tantangan

Berbagai tantangan yang dihadapi dalam pembangunan perkebunan anatara lain sebagai berikut:

- a. Upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman melalui berbagai upaya pembangunan perkebunan selama ini belum sepenuhnya dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Secara umum produktivitas komoditas perkebunan masih rendah dan masih dapat ditingkatkan.
- b. Tuntutan mutu produk hasil perkebunan akhir-akhir ini baik dalam negeri maupun pasaran dunia semakin meningkat. Namun, produk yang dihasilkan perkebunan rakyat pada umumnya masih rendah sehingga menyebabkan harga jual produk yang diterima petani rendah.
- c. Disadari bahwa kelembangaan ekonomi petani perkebunan saat ini perkembangannya masih belum seperti yang diharapkan. Kondisi ini tentu saja akan mempengaruhi kemampuan rebut-tawar petani terutama dalam hal bermitra bisnis pemasaran hasil-hasil perkebunan.
- d. Perekonomian Indonesia tidak terlepas dari gejolak lingkungan strategis yang terus berkembang secara dinamis. Adanya *General Agreement On Tariffs and Trade (GATT)*, putaran Uruguay yang lebih meliberalisasi perdagangan internasional dan pembentukan kawasan bebas termasuk *Asean Free Trade Area (AFTA)*, *North American Free Trade Association (NAFTA)*, *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)* dan *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)* akan melibatkan Indonesia pada perdagangan global yang lebih kompetitif pada masa mendatang dan kemungkinan merubah peta keunggulan komperatif perkebunan Indonesia.

2. Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pembangunan perkebunan selama ini dan diperkirakan akan menjadi kendala di masa depan antara lain adalah :

- a. Pada beberapa lokasi pengembangan perkebunan masih dijumpai kesulitan dalam mendapatkan benih atau bahan tanaman yang bermutu tinggi. Hal ini karena adanya kesenjangan antara kebutuhan dengan penyediaan secara wilayah dan waktu penyediaan disamping mutu dan persyaratannya. Kondisi ini menyebabkan petani dalam mengembangkan tanaman masih banyak yang menggunakan benih yang bermutu rendah yang pada

gilirannya menyebabkan mutu tanaman yang dikembangkan berkualitas rendah dengan produktivitas yang rendah pula.

- b. Mengingat lokasi pengembangan perkebunan umumnya pada wilayah yang cukup terpencil menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan pupuk dan obat-obatan dengan jumlah, mutu dan waktu yang tepat untuk penggunaannya disamping mahalnya ongkos angkut ke lokasi. Situasi ini tentu saja berakibat pada rendahnya produksi tanaman.
- c. Pengembangan perkebunan yang dilaksanakan selama ini sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, baik sumber daya petani perkebunan sebagai pelaksana maupun sumber daya aparat Pembina. Meskipun telah dilaksanakan berbagai upaya pembinaan, namun kondisi sumber daya manusia yang terkait dengan pembangunan perkebunan masih perlu ditingkatkan, baik dalam produktivitas tenaga kerja maupun penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

3. Peluang

Hasil pembangunan perkebunan yang telah dicapai selama ini merupakan modal bagi pembangunan perkebunan periode selanjutnya. Keberhasilan pengembangan perkebunan membuka peluang untuk lebih meningkatkan usaha pembangunan perkebunan selanjutnya, terutama untuk mencapai sasaran pembangunan. Berbagai peluang dalam pengembangan perkebunan antara lain:

- a. Selama pelaksanaan pembangunan berbagai kegiatan untuk meningkatkan produksi telah banyak dilakukan antara lain dalam hal penyediaan benih unggul. Bibit dan benih unggul merupakan salah satu komponen teknologi yang penting dalam pencapaian peningkatan produksi perkebunan. Melalui berbagai program pemuliaan tanaman telah dihasilkan berbagai benih/bibit unggul untuk tanaman perkebunan. Berbagai varietas yang telah berhasil dilepas memberi peluang bagi peningkatan produksi di waktu yang akan datang.
- b. Kecendrungan permintaan pasar untuk komoditas perkebunan baik di dalam negeri maupun diluar negeri terus meningkat, sehingga merupakan

peluang untuk perkembangan produksi komoditas perkebunan. Disamping itu dari berbagai kajian menunjukkan bahwa sebagian besar komoditas perkebunan mempunyai keunggulan, baik keunggulan komparatif maupun kompetitif dan mempunyai prospek yang baik dalam perdagangan dunia.

- c. Agro industri didalam negeri saat ini sedang dalam tahap pengembangan yang memerlukan dukungan pasokan bahan baku yang cukup, kondisi ini juga merupakan peluang untuk mengembangkan perkebunan.
- d. Sampai sekarang produktivitas hasil perkebunan masih dibawah produktivitas potensial sebagai mana yang dihasilkan melalui penelitian. Hal ini merupakan peluang untuk peningkatan produksi perkebunan. Dalam rangka meningkatkan produktivitas ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya antara lain intensifikasi, rehabilitasi, penggunaan sarana produksi yang optimal serta penyuluhan.

§ Model Pendekatan Pembangunan

Pembangunan nasional di masa lalu lebih didasarkan pada tujuan pencapaian pertumbuhan ekonomi dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang cenderung mengabaikan aspek pemerataan manfaat pembangunan tersebut, di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan efisiensi kapital menjadi hal yang fundamental untuk pencapaian kesejahteraan. Hal ini telah mendorong perhatian pemerintah lebih tertuju kepada sektor atau daerah yang dinilai dapat memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dan efisiensi.

Perhatian secara serius terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia berawal sejak diberlakukannya pembangunan secara berencana oleh pemerintah (Orde Baru) pada tahun 1969. Untuk selanjutnya rancangan pembangunan diwujudkan berupa pembangunan nasional berdasarkan atas Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang merupakan acuan untuk program pembangunan jangka panjang. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) sebagai acuan untuk program pembangunan jangka menengah. Selain itu, masih banyak lagi kebijaksanaan yang sifatnya mendukung atau harus sejalan dengan kedua program pembangunan dimaksud, misalnya APBN yang disusun setiap tahun. Demikian pula dengan kebijaksanaan yang disusul kemudian, baik langsung dalam kerangka

pelaksanaannya maupun yang tidak langsung karena tuntutan yang semakin berkembang.

Pembangunan yang dilaksanakan dalam konteks dimaksud, beranjak dari pemikiran yang dibangun dari teori pembangunan, sehingga mencakup semua aspek atau bidang pembangunan. Kemudian karena pembangunan tidak mungkin dilaksanakan secara simultan, maka harus ada prioritas yaitu dengan memfokuskan perhatian pada bidang tertentu. Dalam hal pembangunan nasional, prioritas dimaksud mengedepankan pembangunan di bidang ekonomi. Hal ini tercermin dari selama beberapa kali Repelita, dengan program utama yang populer dengan sebutan Trilogi Pembangunan.

Paradigma baru pembangunan yang tidak hanya mengedepankan aspek efisiensi kapital dan pertumbuhan ekonomi adalah paradigma pembangunan yang mengacu kepada teori ekonomi yang disebut sebagai *The Second Theorm Of Welfare Economics*. Implikasi yang penting dari paradigma baru tersebut adalah memberikan justification (pembenaran) tentang pentingnya pemerataan yang akan menyumbang kepada pertumbuhan. Arah dari paradigma baru tersebut adalah tercapainya pemerataan (*equity*) yang akan mendorong kepada pertumbuhan ekonomi (*efficiency*) dan keberlanjutan (*sustainability*).

Secara spasial, paradigma pembangunan tersebut diartikan sebagai mencari keseimbangan merata secara regional (*regional balance*) dengan memanfaatkan potensi dan jenis keunggulan yang terdapat di masing-masing wilayah dan menghapuskan terjadinya urban biased.

Secara konseptual, untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dapat diterapkan dua pendekatan, yaitu melalui pendekatan sektoral dan regional. Konsep pembangunan berdasarkan pendekatan sektoral adalah menentukan sektor yang akan dikembangkan sebagai prioritas utama, sedangkan menetapkan lokasi/wilayah bagi pengembangan sektor tersebut merupakan langkah kedua (*Sugeng Budiharso, 1983*). Dengan semakin kompleksnya faktor-faktor yang berkaitan dengan persoalan pembangunan, pendekatan kombinasi antar keduanya (*win and win*) menjadi pilihan banyak kalangan dan semakin sering digunakan, sedangkan pendekatan sektoral yang cenderung bersifat ego-

sektor (*win and lose*) semakin tidak populer.

§ **Konsep Pembangunan Kewilayahan**

Konsep pembangunan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Dengan demikian pengertian wilayah menjadi penting untuk dikaji. Menurut PP Nomor 47 Tahun 1997 wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

Berdasarkan konsep tersebut, pembangunan wilayah merupakan upaya memberdayakan stakeholders di suatu wilayah dalam memanfaatkan sumberdaya alam dengan teknologi untuk memberi nilai tambah atas apa yang dimiliki oleh wilayah administratif atau wilayah fungsional dalam rangka meningkatkan kualitas hidup rakyat di wilayah tersebut. Dengan demikian dalam jangka panjangnya pengembangan wilayah mempunyai target untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Cara mencapainya bersandar pada kemampuan SDM dalam memanfaatkan lingkungan sekitar dan daya tampungnya serta kemampuan memanfaatkan instrument yang ada. Dengan target tersebut dirancang skenario-skenario tertentu agar kekurangan-kekurangan yang dihadapi dapat diupayakan melalui pemanfaatan resources. Apabila konsep tersebut diterapkan di Indonesia, muncul persoalan berupa kekurangan teknologi untuk mengolah resources yang melimpah.

Konsep Marshal Plan yang berhasil menuntun pembangunan Eropa setelah PD II telah mendorong banyak negara berkembang untuk berkiblat dan menerapkan konsep tersebut. Padahal kenyataan menunjukkan bahwa konsep ini membawa kegagalan dalam menciptakan pembangunan secara merata antar daerah. Secara geografis misalnya beberapa pusat pertumbuhan maju secara dramatis, sementara beberapa pusat pertumbuhan lainnya masih jauh tertinggal atau jauh dari kemampuan berkembang.

Selanjutnya (*Glasson, 1977*) mengemukakan bahwa, untuk menjelaskan adanya pertumbuhan pada suatu wilayah dengan menekankan pada hubungan antar sektor yang terdapat dalam perekonomian dan kekuatan-kekuatan pendorong

dari satu sektor ke sektor lainnya (baik langsung maupun tidak langsung) sering menggunakan teori perencanaan pembangunan wilayah. Salah satu pendekatan yang relatif sederhana dalam teori ini adalah teori basis ekonomi (*economy base theory*), sedangkan pendekatan yang lebih kompleks meliputi teori pengganda perdagangan dan analisis input–output. Namun perlu diingat bahwa semua pendekatan tersebut hanya berusaha menjelaskan perubahan wilayah dalam jangka pendek.

Pada dasarnya kegiatan ekonomi wilayah akan berkaitan dengan persoalan input-output. Menurut (*Tadjudin Nur Iskandar, 1991*), ditinjau dari perspektif makro terdapat dua aspek penting yang terjadi dalam suatu kegiatan ekonomi wilayah, yaitu (1) adanya interaksi/kesalingbergantungan (*interdependency*) antar sektor-sektor ekonomi, dan (2) adanya kontribusi suatu sektor terhadap sektor lainnya. Dengan demikian, adanya perubahan input-output akan berdampak berantai terhadap input-output antar sektor.

Keterkaitan sektoral termaksud menurut (*Miernyk dan Vrinkman, 1990*) bisa berupa keterkaitan langsung maupun tidak langsung. Keterkaitan tersebut bisa berupa keterkaitan ke belakang, yaitu adanya hubungan input, sedangkan keterkaitan ke depan bisa tercipta melalui hubungan output. Lebih lanjut (*Suwardjoko Warpani, 1984*) mengemukakan bahwa, selain keterkaitan langsung dan tidak langsung terdapat keterkaitan sampingan yang merupakan keterkaitan tak langsung yang lebih panjang dan kompleks.

Implikasi lebih lanjut, pola hubungan keterkaitan tersebut tentunya akan bersinggungan dengan persoalan ruang (*space*) yang semakin hari menunjukkan gejala yang semakin kritis dan menjadi sumberdaya yang langka. Hal ini merupakan akibat semakin tingginya permintaan masyarakat untuk berbagai tujuan penggunaan. Dengan demikian, ruang sebagai basis aktivitas ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga mampu mengakomodir berbagai kepentingan. Terhadap persoalan tersebut, (*Sen, 1972*) memberikan acuan keterpaduan penggunaan ruang, yaitu : (a) keterpaduan secara fungsional, dan (b) keterpaduan tata ruang. Keterpaduan dimaksud adalah berkaitan dengan lintas sektor dan multisektor, multi tingkat dan multi seksi.

- Keterpaduan secara fungsional, mencakup keterpaduan semua kegiatan sosial ekonomi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, yaitu mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Perubahan pada satu sektor akan mengakibatkan perubahan pada sektor lain.
- Keterpaduan tata ruang, meliputi keterpaduan antar hubungan berbagai kegiatan sosial ekonomi yang spesifik di lokasi tersebut yang bergantung pada beberapa faktor, antara lain tingkat pembangunan pada umumnya, permintaan terhadap fungsi tertentu dan pasokannya, kemudahan untuk memperoleh fungsi tersebut dalam pengertian jalan dan transportasi, waktu dan jarak tempuh serta ongkos, tingkat pendapatan, biaya untuk pengadaan suatu fungsi dan sebagainya.

2.3 Komoditas Unggulan

2.3.1 Pengertian Komoditas Unggulan

Menurut (*Tumenggung, 1996*) komoditas unggulan adalah sektor yang memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantages*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta mampu memberikan nilai manfaat yang besar. Jadi sektor unggulan merupakan sektor kegiatan usaha yang dapat diunggulkan dalam rangka pengembangan dan pembangunan perekonomian sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Setiap wilayah mempunyai sektor unggulan yang berbeda-beda, tergantung pada potensi (kekuatan dan kelebihan) yang secara alamiah dimiliki oleh wilayah yang bersangkutan

Yang dimaksud komoditas unggulan adalah komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dengan produk sejenis dari wilayah lain serta mampu memberikan manfaat yang besar. Komoditas unggulan mempunyai kriteria (*Mawardi 1991 dalam kutipan Asnawati, 1997*) sebagai berikut :

1. Komoditas yang mempunyai tingkat produksi tinggi sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah

2. Komoditas yang mempunyai efek pengganda yang besar terhadap kegiatan perekonomian lain dan pengembangan kawasan sekitar.
3. Komoditas yang mempunyai permintaan pasar yang tinggi, baik pasar luar negeri maupun dalam negeri.
4. Memiliki dampak spasial yang besar dalam mendorong pengembangan wilayah.

Pengembangan pertanian (*Benry Simbolon, H, 1981*) yang bernilai potensial, akan merupakan usaha yang mendukung peningkatan pertanian bagi daerah mengingat pentingnya bahan-bahan yang dihasilkan di dalam perekonomian daerah. Dalam arti memberikan sumbangan besar bagi pendapatan daerah, menyediakan bahan-bahan untuk konsumsi masyarakat dan pengusahanya meliputi sebagian besar rakyat petani.

Mengingat bahwa kegiatan pertanian yang menghasilkan bahan-bahan tertentu ini sangat berperan dalam kehidupan dan penghidupan daerah serta memiliki kapasitas lebih yang belum dimanfaatkan sepenuhnya maka kegiatan ini sangat potensial dalam meningkatkan laju pertumbuhan daerah. Karena dengan investasi yang relatif kecil dalam kegiatan pertanian ini, mungkin sudah cukup untuk mendorong pertumbuhan daerah.

Perkebunan sebagai suatu sub sistem dalam sistem pertanian di Indonesia, akhir-akhir ini menjadi sorotan tajam para ahli dan pemikir-pemikir kita. Ini merupakan suatu fenomena baru, karena selama puluhan tahun perhatian kita lebih banyak diarahkan pada sub sistem pertanian tanaman pangan, dan itupun lebih pada padi sebagai tanaman pangan pokok kita. Adapun mengapa perkebunan sebagai satu sub-sistem pertanian kurang mendapat perhatian para ahli adalah karena, disamping memang prioritas sedang diarahkan pada tanaman pangan, juga karena perkebunan sebagai satu sistem sudah dianggap mapan.

Pengertian Komoditi Unggulan dalam hal ini adalah :

§ Jenis komoditi yang dikembangkan oleh penduduk setempat dan paling banyak memberi kontribusi pada pendapatan dan kehidupan ekonomi penduduk lokal.

§ Komoditi tersebut memiliki prospek pasar (ekspor dan dalam negeri) yang cerah minimal 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun kedepan.

Terdapat dua teori komoditas unggulan yaitu, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, berikut penjelasannya :

Ü **Keunggulan Komparatif**

Teori unggulan komparatif pertama kali ditemukan oleh David Ricardo, yang menyatakan sebaiknya suatu negara melakukan dan mengekspor barang-barang di mana negara tersebut memiliki keunggulan. Dapat diartikan pula bahwa produktivitas relatif yang dimiliki oleh negara tersebut dalam memproduksi barang-barang ekspor tadi adalah paling tinggi.

Prinsip keunggulan komparatif menyatakan bahwa suatu negara dapat melakukan perdagangan meskipun secara absolut lebih efisien (atau lebih tidak efisien) dalam memproduksi setiap komoditi dibandingkan dengan negara lain. Prinsip keunggulan komparatif mengatakan bahwa setiap negara akan berspesialisasi dalam produksi dan mengekspor barang yang biayanya relatif rendah (artinya relatif lebih efisien dibandingkan negara lain); sebaliknya, setiap negara akan mengimpor barang yang produksinya relatif lebih tinggi (dengan kata lain kurang efisien dibandingkan negara lain). Prinsip sederhana ini merupakan dasar yang tidak tergoyahkan dalam perdagangan internasional.

Ü **Keunggulan Kompetitif**

Unggulan kompetitif adalah upaya untuk meningkatkan produksi suatu komoditi dengan mutu dan biaya yang baik agar dapat menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi, sebagaimana mana dinyatakan oleh (*Sahat Barita Simanjuntak, 1992*) bahwa daya saing adalah kemampuan suatu produsen untuk memproduksi suatu komoditi dengan mutu dan biaya yang rendah, sehingga dengan harga-harga yang terjadi di pasar internasional dapat diproduksi dan dipasarkan oleh produsen dengan laba yang mencukupi sehingga dapat mempertahankan keberlanjutannya.

Upaya untuk meningkatkan keunggulan kompetitif pada prinsipnya sejalan dengan upaya untuk meningkatkan keunggulan komparatif. Oleh karena itu peningkatan mutu produktivitas dan efisiensi penggunaan biaya juga merupakan

komponen-komponen penting dalam meningkatkan keunggulan kompetitif suatu aktivitas ekonomi, disamping adanya kebijakan pemerintah yang kondusif.

2.3.2 Kriteria Penentuan Komoditas Unggulan

Menurut (*Mulyanto, 1999*) dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang dapat dikembangkan untuk mendukung kontribusinya terhadap pendapatan daerah dapat dilakukan melalui pendekatan yang menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDRB meningkat di suatu wilayah dilihat dari laju pertumbuhan dan kontribusi sektor.
2. Kesejahteraan penduduk meningkat, hal ini berpengaruh pada perkembangan sektor.
3. Memiliki potensi pasar yang prospektif, baik pasar lokal, regional maupun pasar internasional.
4. Efisiensi investasi, yaitu dengan investasi yang kecil dapat menghasilkan output yang sebesar-besarnya.
5. Memiliki skala ekonomi yang besar sehingga potensial untuk dikembangkan.
6. Mempunyai kontribusi yang besar terhadap kegiatan ekonomi pada wilayah tersebut .
7. Menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar
8. Memiliki dampak spasial yang besar dalam mendorong pengembangan wilayah, baik dalam lingkup provinsi maupun nasional.

Untuk mampu berkembang, wilayah harus mempunyai potensi untuk menghasilkan suatu yang bernilai ekonomi. Pengertian potensial sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang mempunyai kekuatan, kemampuan dan ketangguhan untuk dikembangkan lebih lanjut.

Untuk menentukan suatu perkebunan dalam suatu wilayah dapat dikatakan sebagai sektor potensial, sektor tersebut harus memenuhi beberapa kriteria. Suatu sektor dapat dikatakan potensial (*Misnawati, 1998*), bila sektor tersebut mempunyai prospek untuk dikembangkan dan ditingkatkan produksinya, wilayah pemasaran luas, input mudah didapat dan dapat menjadi input pada sektor industri

sehingga akhirnya meningkatkan kondisi perekonomian dan menjadi penggerak dalam pengembangan wilayah.

Berdasarkan kriteria yang di jelaskan pada tinjauan-tinjauan pustaka sebelumnya, maka dalam studi ini kriteria yang akan digunakan dalam penentuan komoditas unggulan sub sektor perkebunan di kabupaten Kampar meliputi :

- a. Komoditas dengan laju pertumbuhan dan kontribusi yang tinggi sehingga dapat meningkatkan perekonomian kabupaten Kampar
- b. Memiliki lahan perkebunan yang luas serta memiliki tingkat kesuburan tanah yang tinggi
- c. Kemampuan Produksi komoditi yang besar
- d. Memiliki dukungan kebijakan dari pemerintah daerah

Dari beberapa kriteria diatas akan diperoleh variabel/indikator dimana hal tersebut yang akan digunakan dalam penentuan komoditas unggulan sub sektor perkebunan yang ada di kabupaten Kampar, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kriteria, Variabel dan Indikator Dalam Penentuan Komoditas Unggulan Sub Sektor Perkebunan Di Kabupaten Kampar

| No | Kriteria | Variabel | Indikator |
|----|------------------------|---|---|
| 1 | Perkembangan Komoditas | § Laju pertumbuhan produksi komoditas sub sektor perkebunan § Kontribusi komoditas sub sektor perkebunan | § Rata-rata pertumbuhan Komoditas sub sektor perkebunan § Besaran proporsi komoditas sub sektor perkebunan |
| 2 | Ketersediaan SDA | § Ketersediaan lahan perkebunan | § Luas lahan § Curah Hujan § Kemiringan Lereng § Ketinggian |
| 3 | Kemampuan Produksi | § Jumlah produksi | § Tingkat kesuburan lahan |
| 4 | Kebijakan Pemerintahan | § Dukungan pemerintah daerah | § Kebijakan sektoral dan kebijakan spasial |

Sumber : Berbagai Literatur

2.3.3 Faktor-Faktor Pendukung Pengembangan Komoditas Unggulan

§ Lahan

Lahan merupakan lapisan paling atas dari kulit bumi terjadinya kehidupan, aktivitas dan pembangunan oleh manusia. Lahan merupakan salah satu

pengaruh tingginya nilai suatu kawasan karena berfungsi sebagai pengikat kegiatan antara subjek dan objek pembangunan dan dipandang sebagai properti strategis dalam pengembangan suatu kawasan. Dengan demikian sumber daya lahan merupakan seluruh potensi fisik kealamiah lahan ditambah dengan berbagai kegiatan pembangunan yang di atasnya (*Harvey, 1996*).

Lahan juga merupakan sumber daya alam yang terpenting dalam pembangunan kota dengan batasan, terlebih lagi dengan bertambahnya jumlah penduduk menimbulkan kebutuhan lahan dalam menyediakan ruang untuk fasilitas, utilitas maupun sarana yang lain yang diperlukan bagi kelengkapan hidup manusia (*Karyoedi, 1993*).

§ Sumber Daya Manusia (Tenaga Kerja)

Penduduk merupakan faktor utama perencanaan, maka pengetahuan akan tingkah laku dan perkembangan penduduk merupakan bagian pokok pula dalam proses perencanaan. Pengetahuan kependudukan ini menyangkut berbagai hal yang dapat disimpulkan dalam dua golongan utama yaitu kualitas penduduk dan kuantitas penduduk. Masalah pokok dalam kualitas penduduk adalah keadaan masyarakat, dan merupakan masalah sosial yang lebih banyak berkaitan dengan masalah non-kuantitatif (*Warpani, 1984*).

- 3 Didalam pembangunan, masalah kualitatif ini tidak dapat terabaikan, karena pembangunan bukan sekedar masalah kuantitatif semata-mata. Masalah kuantitas penduduk lebih menyangkut peninjauan keadaan jumlah penduduk baik secara umum, maupun pembagiannya berdasarkan berbagai macam kegiatan. Pengetahuan ini dapat memberi gambaran kepada para perencana maupun para penentu kebijaksanaan (pejabat eksekutif) tentang keadaan umum masyarakat atau penduduk untuk siapa perencanaan dan pembangunan ditujukan (*Warpani, 1984*).
- 4 Selain dua hal pokok diatas, ada satu hal lagi yang sebenarnya dapat dimasukkan dalam kelompok kualitas penduduk, namun akan lebih menonjol kepentingannya bila dikhususkan yang dapat digunakan sebagai ukuran perkembangan suatu daerah atau kota, yaitu pergerakan penduduk.

Masalah ini lebih banyak dikenal dengan istilah migrasi, namun migrasi lebih sempit pengertiannya daripada pergerakan penduduk (*Warpani, 1984*).

Yang di maksud dengan komoditas unggulan adalah komoditas yang mempunyai *keunggulan komparatif* dan *keunggulan kompetitif* dengan produk sejenis dari wilayah lain serta mampu memberikan manfaat yang besar. Komoditas unggulan mempunyai kriteria (*Mawardi, 1991 dalam Asnawati, 1997*) sebagai berikut :

5. Komoditas yang mempunyai tingkat produksi tinggi sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
6. Komoditas yang mempunyai efek pengganda yang besar terhadap kegiatan perekonomian lain dan pengembangan kawasan sekitar.
7. Komoditas yang mempunyai permintaan pasar yang tinggi, baik pasar luar negeri maupun dalam negeri.
8. Memiliki dampak spasial yang besar dalam mendorong pengembangan wilayah.

Pengembangan pertanian (*Hardy Benry Simbolon, 1981*) yang bernilai potensial, akan merupakan usaha yang mendukung peningkatan pertanian bagi daerah mengingat pentingnya bahan-bahan yang dihasilkan di dalam perekonomian daerah. Dalam arti memberikan sumbangan besar bagi pendapatan daerah, menyediakan bahan-bahan untuk konsumsi masyarakat dan pengusahanya meliputi sebagian besar rakyat petani.

Mengingat bahwa kegiatan pertanian yang menghasilkan bahan-bahan tertentu ini sangat berperan dalam kehidupan dan penghidupan daerah serta memiliki kapasitas lebih yang belum dimanfaatkan sepenuhnya maka kegiatan ini sangat potensial dalam meningkatkan laju pertumbuhan daerah. Karena dengan investasi yang relatif kecil dalam kegiatan pertanian ini, mungkin sudah cukup untuk mendorong pertumbuhan daerah.

2.4 Perangkat Analisis

2.4.1 Metode Analisis Kesesuaian Lahan (Land Suitability Analysis)

Kesesuaian lahan adalah kecocokan suatu lahan untuk penggunaan tertentu. Lebih spesifik lagi kesesuaian lahan tersebut ditinjau dari sifat-sifat fisik lingkungan yang terdiri dari iklim, tanah, topografi, hidrologi dan/ atau drainase sesuai untuk suatu usaha tani atau komoditas tertentu yang produktif (*Sitorus, 1985*) Dalam proses analisis sumberdaya lahan dilakukan secara tidak langsung yaitu dengan mengasumsikan bahwa lahan tertentu dan sifat-sifat lainnya yang terdapat pada suatu lokasi akan mempengaruhi keberhasilan suatu jenis penggunaan lahan tertentu.

Analisis kesesuaian lahan ini merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan terjadinya konflik dalam penggunaan lahan. Dalam analisis sumberdaya lahan ini hal yang dilakukan adalah suatu upaya untuk mengukur kapasitas/kemampuan dari sumberdaya yang tersedia untuk menopang tingkat atau laju penggunaan sumberdaya dalam produksi. Dengan didapatnya kapasitas dari sumberdaya lahan tersebut maka diharapkan dalam pengembangan penggunaan lahan tersebut tidak terjadi eksploitasi yang tidak sesuai dengan daya dukung lahan tersebut.

Dalam upaya menganalisis kondisi fisik di wilayah studi ini digunakan metoda analisis kualitatif yaitu membandingkan antara keadaan di lapangan dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan baik berupa peraturan perundangan maupun studi – studi yang telah dilakukan. Dalam upaya untuk mencapai studi ini menggunakan AUTOCAD dan Sistem Informasi Geografis dengan software ARC / Info. Alasannya adalah karena kemampuannya yang mempermudah dan mempercepat analisis serta tingkat keakuratannya dapat diandalkan.

Tahapan yang dilakukan dalam analisis fisik dan daya dukung lahan ini adalah:

1. Melakukan analisis terhadap kondisi fisik dasar

Analisis ini dilakukan untuk melihat potensi dan kendala yang ada dari keadaan fisik dasar. Pada tahapan ini sesuai dengan metoda yang digunakan,

dilakukan pemasukan data – data spasial yaitu yang berupa peta – peta tematik tentang keadaan fisik dasar wilayah studi. Kemudian diadakan pendelineasian wilayah dengan melakukan analisis tumpang tindih (*super impose*) dari peta – peta tematik tersebut. Adapun yang menjadi dasar kriteria digunakan Keppres No. 32 Tahun 1990 untuk penentuan kawasan lindung dan Keppres No. 57 Tahun 1989 untuk penentuan kawasan budidaya, dan peraturan serta studi – studi yang berhubungan dengan studi yang dilakukan.

2. Mengkaji tingkat kesesuaian antara penggunaan lahan dengan daya dukung (kesesuaian lahan) hasil analisis pada tahap satu di atas.

Tahapan ini berisi analisis keterkaitan antara penggunaan lahan saat ini dengan daya dukung lahan (kesesuaian lahan). Dalam analisis ini terutama difokuskan pada penggunaan lahan untuk industri, perdagangan dan jasa serta perumahan. Hal ini juga bertujuan untuk mendukung arahan pengembangan sektor berdasarkan karakteristik fisik sehingga dapat sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

3. Arahan pemanfaatan ruang

Arahan penggunaan lahan ini merupakan penggunaan lahan gabungan dari hasil kesesuaian lahan untuk setiap peruntukan. Dalam penentuan arahan penggunaan lahan ini juga mempertimbangkan perkembangan untuk setiap peruntukan di setiap kecamatan. Hal tersebut merupakan upaya agar pengembangan sektor budidaya dalam arahan penggunaan lahan dapat sesuai dengan perkembangan yang telah ada.

Kesesuaian lahan adalah kecocokan suatu lahan untuk penggunaan tertentu. Lebih spesifik lagi kesesuaian lahan tersebut ditinjau dari sifat – sifat fisik lingkungannya yang terdiri dari iklim, tanah, topografi, hidrologi dan/ atau drainase sesuai untuk suatu usaha tani atau komoditas tertentu yang produktif (*Sitorus, 1985*).

Tabel 2.2
Habitat Tanam Komoditas Perkebunan

| No | Komoditas | Kesesuaian Tanam Komoditas Perkebunan | | | | Manfaat |
|----|--------------|---|--|---|---|--|
| | | Kondisi Suhu Udara | Jenis Tanah | Ketinggian | Curah Hujan | |
| 1 | Kelapa Sawit | § 25-28°C | <ul style="list-style-type: none"> • Vukkanis tua • Tanah Gambut • Reaksi tanah mempunyai nilai PH 3,0-8,0 | 25-40% | <ul style="list-style-type: none"> • 2000 mm/tahun • Kondisi optimal 2500-4000 mm/tahun yang terbagi kedalam 100-150 hari hujan | § Kelapa sawit sangat banyak manfaat dan fungsinya, salah satunya diolah untuk dijadikan minyak goreng dan beragam olahan industri lainnya sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan pat di pasarkan/ekspor |
| 2 | Karet | • 28°C | <ul style="list-style-type: none"> • Dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah • Vukkanis muda • Vukkanis tua • Tanah Gambut • Reaksi tanah mempunyai nilai PH 3,0-8,0 | 200-600 m dpl | <ul style="list-style-type: none"> • 2000 mm/tahun • Kondisi optimal 2500-4000 mm/tahun yang terbagi kedalam 100-150 hari hujan | -Cairannya batangnya disadap untuk membuat karet alam bagi berbagai tujuan yang beraneka ragam. Pohon karet tumbuh liar di hutan tropik basah sepanjang DAS sungai Amazon (daerah asalnya) |
| 3 | Kelapa | <ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata untuk kehidupan optimal 29°C Tahunan • Pertumbuhan vegetatif 29°C • Pertumbuhan buah memerlukan susu 25°C, dengan kisaran 5-7°C | <ul style="list-style-type: none"> • Tanah Aluvial (endapan) • Tanah Lateritic • Tanah Regosol • Tanah Vulkanis • Tanah liat dan tanah berkapur | <ul style="list-style-type: none"> • 0-500 m dpl • Kelapa dapat tumbuh pada ketinggian > 1000 m dpl, tetapi lambat sekali, baru dapat berbuah pada umur 12 tahun, buahnya dan kandungan minyaknya rendah | <ul style="list-style-type: none"> • Curah hujan optimal 1300-2300 mm/tahun • Curah hujan 4000-1000 mm/tahun masih bisa ditolerir | Bahan pangan, bumbu penyedap minyak konsumsi utama, bahan dasar industri pangan, bahan bangunan serta hiasan dalam berbagai upacara adat. Berasal dari Amerika Serikat. |

Sumber : Berbagai Sumber (Terbitan dari CV. Yasaguna)

Pengertian kesesuaian lahan (*land suitability*) berbeda dengan kemampuan lahan (*land capability*). Kemampuan lahan lebih menekankan pada kapasitas berbagai penggunaan lahan secara umum yang dapat diusahakan di suatu wilayah. Jadi semakin banyak jenis tanaman yang dapat dikembangkan, maka semakin tinggi kemampuan lahan tersebut.

Dalam melakukan proses analisis perlu adanya suatu landasan hukum berupa aturan – aturan yang mengacu pada Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 tentang Kriteria Kesesuaian Lahan, yaitu:

1. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya (UU No 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang);
2. Kawasan Lindung adalah kawasan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, kawasan lindung terdiri dari:
 - a. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan dan sifat wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutup vegetasi secara tetap guna mempertahankan fungsi kawasan tersebut dan sekitarnya;
 - b. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya merupakan suatu kawasan yang mempunyai sifat yang khas di peruntukan secara khusus untuk perlindungan alam hayati (flora dan fauna).
3. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang harus di lindungi karena keadaan dan sifat dan fisiknya dekat dengan laut, mata air dan bendungan / waduk juga berfungsi sebagai kawasan resapan air;
4. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam;
5. Kawasan Limitasi merupakan suatu kawasan yang tidak bisa dimanfaatkan untuk adanya suatu kegiatan;
6. Kawasan Kendala atau kawasan cadangan pengembangan wilayah yaitu suatu kawasan yang dipersiapkan untuk menampung pengembangan kegiatan di wilayah yang semakin padat dan sudah tidak ada lagi potensi yang kosong di wilayah tersebut;
7. Kawasan Potensial adalah kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan di wilayah;
8. Kemampuan Lahan adalah lahan potensial yang dapat dimanfaatkan untuk menampung segala aktivitas yang ada di atasnya;

9. Kesesuaian Lahan adalah peruntukkan lahan dalam penggunaannya (segala aktivitas yang ada di atasnya);
10. Kawasan Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai;
11. Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan/ kanal/ saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;
12. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki potensi dan daya tarik yang berasal dari keindahan alam maupun buatan manusia yang berfungsi untuk memperkenalkan hasil budaya setempat pada masyarakat luas;
13. Kawasan Pertambangan adalah kawasan yang mempunyai potensi dari kekayaan alam yang berasal dari mineral isi bumi yang terdiri atas beberapa jenis kawasan pertambangan.

Dalam proses analisis sumberdaya lahan dilakukan secara tidak langsung yaitu dengan mengasumsikan bahwa lahan tertentu dan sifat – sifat lainnya yang terdapat pada suatu lokasi akan mempengaruhi keberhasilan suatu jenis penggunaan lahan tertentu.

Analisis sumberdaya lahan ini bertujuan untuk menentukan arahan pemanfaatan sumberdaya lahan untuk berbagai penggunaan baik bagi kawasan lindung maupun bagi kawasan budidaya. Untuk mendapatkan kesesuaian lahan tersebut disusun kriteria – kriteria bagi suatu penggunaan lahan yang pada dasarnya diarahkan agar penggunaan lahan tersebut sesuai dengan kemampuan lahan untuk menopang kegiatan di atasnya dengan tidak menimbulkan kerusakan yang berarti baik bagi kawasan tersebut maupun bagi kawasan sekitarnya. Sesuai dengan fokus studi yaitu pada masalah aspek fisik maka dalam penentuan kriterianya juga lebih ditekankan pada kondisi fisik dasar saja.

Analisis kesesuaian lahan ini merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan terjadinya konflik dalam penggunaan lahan. Dalam analisis sumberdaya lahan ini hal yang dilakukan adalah suatu upaya untuk mengukur kapasitas/ kemampuan dari sumberdaya yang tersedia untuk menopang tingkat atau laju penggunaan sumberdaya dalam produksi. Dengan didapatnya kapasitas dari sumberdaya lahan tersebut maka diharapkan dalam pengembangan penggunaan lahan tersebut tidak terjadi eksploitasi yang tidak sesuai dengan daya dukung lahan tersebut.

Menurut Keppres Nomor 57 Tahun 1989 Tentang Kawasan Budidaya, maka dapat disimpulkan bahwa lahan yang sesuai guna pengembangan kawasan budidaya pertanian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kriteria Kesesuaian Lahan Kawasan Budidaya Pertanian

| Kawasan Pertanian | Kriteria |
|-------------------------------------|--|
| Kawasan Tanaman Pangan Lahan Basah | 1. Ketinggian < 1.000 m 2. Kelerengan < 40 % 3. Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm |
| Kawasan Tanaman Pangan Lahan Kering | 1. Ketinggian < 1.000 m 2. Kelerengan < 40 % 3. Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm |

Sumber: Keppres Nomor. 57 Tahun 1989 Tentang Kawasan Budidaya

Sesuai dengan tujuannya kesesuaian lahan dibedakan atas kesesuaian lahan secara fisik (kualitatif) dan kesesuaian lahan secara ekonomi (kuantitatif). Sistem kesesuaian lahan yang digunakan, dibedakan menjadi 4 kelas sesuai, yaitu:

Kelas S1 : Lahan sangat sesuai (*Highly suitable*) Lahan tidak mempunyai faktor pembatas yang berat untuk suatu penggunaan secara lestari atau hanya mempunyai pembatas yang tidak berarti dan tidak berpengaruh secara nyata terhadap produksinya serta tidak akan menaikkan masukan dari apa yang telah biasa diberikan.

Kelas S2 : Lahan cukup sesuai (*Moderately suitable*) Lahan yang mempunyai pembatas-pembatas agak berat untuk suatu penggunaan yang lestari. Pembatas ini akan mengurangi produktivitas dan keuntungan dan meningkatkan masukan yang diperlukan.

Kelas S3: Lahan sesuai marginal (*Marginally suitable*) Lahan yang mempunyai pembatas-pembatas yang sangat berat untuk suatu penggunaan yang lestari. Pembatas ini akan mengurangi produktivitas atau keuntungan dan perlu menaikkan masukan yang diperlukan. Kelas N : Lahan tidak sesuai (*Not suitable*) Lahan mempunyai pembatas yang sangat berat, tetapi masih memungkinkan untuk diatasi, perbaikannya yang sangat besar tidak akan sesuai dengan produksi yang dihasilkan.

Untuk tabel selanjutnya dapat dilihat pada **Tabel 2.4** sampai dengan **Tabel 2.6** mengenai kesesuaian lahan untuk setiap komoditas perkebunan.

Tabel 2.4
Kesesuaian Lahan Komoditas Perkebunan Kelapa

| Faktor | Kelas Kesesuaian Lahan | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------|--------|
| | S1 | S2 | S3 | N |
| Temperatur (°C) | 25 – 28 | 28 – 32 | 32 – 35 | > 35 |
| Tekstur | Halus, agak halus, sedang | Halus, agak halus, sedang, agak kasar | Sangat halus | Kasar |
| Kedalaman Tanah (cm) | > 100 | 75 – 100 | 50 – 75 | < 50 |
| Kemiringan Lereng (%) | < 8 | 8 – 16 | 16 – 30 | > 30 |
| Curah Hujan | 2000-3000 | 3000-4000 | 4000-5000 | > 5000 |

Sumber: CSR/ FAO staf (1983) dalam Sitorus

Tabel 2.5
Kesesuaian Lahan Komoditas Perkebunan Karet

| Faktor | S1 | S2 | S3 | N |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|
| | Temperatur (°C) | 26 – 30 | 30 – 34 | - |
| Tekstur | Halus, agak halus, sedang | Halus, agak halus, sedang | Agak kasar | Kasar |
| Kedalaman Tanah (cm) | > 100 | 75 – 100 | 50 – 75 | < 50 |
| Kemiringan Lereng (%) | < 8 | 8 – 16 | 16 – 30 | > 30 |
| Curah Hujan | 2500-3000 | 3000-3500 | 3500-4000 | > 4000 |

Sumber: CSR/ FAO staf (1983) dalam Sitorus

Tabel 2.6
Kesesuaian Lahan Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit

| Faktor | S1 | S2 | S3 | N |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------|
| | Temperatur (°C) | 25-28 | 28-30 | - |
| Tekstur | Lempung berpasir, lebih kasar | Lempung berpasir, lebih kasar | agak halus | halus |
| Kedalaman Tanah (cm) | > 100 | 75-100 | 50-75 | <75 |
| Kemiringan Lereng (%) | >25 | 25-28 | 10-20 | <20 |
| Curah Hujan | 2000-3000 | 3000-4000 | 4000-5000 | > 5000 |

Sumber: CSR/ FAO staf (1983) dalam Sitorus

2.4.2 Analisis Location Quotient (LQ)

Perhitungan dengan menggunakan metoda yang berkaitan dengan pendekatan ekonomi wilayah yaitu dengan metode LQ (*Location Quotion*) yang merupakan analisis penentuan sektor basis dan non basis komoditas. Model perhitungan analisis ini dapat diformulasikan sebagai berikut: (Warpani, Suwardjoko. *Analisis Kota dan Daerah*. ITB, Bandung, 1980, hal.68)

Rumus :
$$LQ = \frac{Si/Ni}{S/N}$$

Dimana:

S_i = Jumlah produksi i di daerah yang diselidiki

S = Jumlah produksi seluruhnya di daerah yang diselidiki

N_i = Jumlah produksi i di seluruh daerah yang lebih luas dimana daerah yang diselidiki menjadi bagiannya.

N = Jumlah seluruh produksi di seluruh daerah yang lebih luas, dimana daerah yang diselidiki menjadi bagiannya.

Istilah wilayah nasional dapat diartikan untuk wilayah induk/wilayah atasan. Misalnya apabila perbandingan antar wilayah kabupaten dengan provinsi, maka provinsi memegang peran sebagai wilayah nasional, dan seterusnya.

Apabila $LQ > 1$ artinya peranan sektor tersebut di daerah itu lebih menonjol dari pada peran sektor secara nasional. Sebaliknya, apabila $LQ < 1$ maka peranan sektor itu di daerah tersebut lebih kecil dari pada peranan sektor tersebut secara nasional. $LQ > 1$ menunjukkan bahwa peranan sektor i cukup menonjol di daerah tersebut dan sering kali sebagai petunjuk bahwa daerah tersebut surplus akan produk sektor i dan mengekspor ke daerah lain. Daerah itu hanya mungkin mengekspor produk ke daerah lain atau luar negeri kalau mampu menghasilkan produk tersebut secara lebih murah atau lebih efisien. Atas dasar itu $LQ > 1$ secara tidak langsung memberikan petunjuk bahwa daerah tersebut memiliki keunggulan komparatif untuk sektor i di maksud.

A. Kriteria dan jangkauan pelayanan LQ:

1. $LQ > 1$; artinya sektor tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan wilayah sendiri juga memberikan peluang untuk mengekspor kewilayah lain, atau sektor tersebut memiliki suplai input-output yang lebih besar dari kebutuhan lokal sehingga mempunyai potensi ekspor.
2. $LQ = 1$; artinya sektor tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan wilayah itu sendiri, atau sektor tersebut mampu menentukan permintaan input-output dalam wilayah sendiri dapat dikatakan wilayah tersebut dalam kondisi perekonomian seimbang.
3. $LQ < 1$; sektor tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan wilayah itu sendiri, atau sektor tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan input-output wilayahnya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhannya dibutuhkan impor.

B. Keunggulan Metode *Locational Quotient* (LQ)

Ada beberapa keunggulan dari metode LQ, antara lain:

- a. Metode LQ memperhitungkan ekspor langsung dan ekspor tidak langsung.
- b. Metod LQ sederhana dan tidak mahal serta dapat di terapkan pada data historis untuk mengetahui tren.

C. Kelemahan Metode *Locational Quotient* (LQ)

Beberapa kelemahan metode LQ adalah:

- a. Berasumsi bahwa pola permintaan disetiap daerah identik dengan pola permintaan bangsa dan bahwa produktivitas tiap pekerja dalam industri-industri nasional.
- b. Berasumsi bahwa tingkat ekspor tergantung pada tingkat di sagnegasi.
- c. Asumsi bahwa pendekatan ini menganggap bahwa semua daerah homogen mengikuti nasional.

2.4.3 Analisis *Shift – Share*

Analisis shift-share juga membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor (industri) di daerah kita dengan wilayah nasional. Akan tetapi, metode ini lebih tajam dibandingkan dengan metode LQ. Metode LQ tidak memberikan penjelasan atas faktor penyebab perubahan sedangkan metode shift-share memperinci penyebab perubahan atas beberapa variabel. Analisis ini menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang menyebabkan perubahan struktur industri suatu daerah dalam pertumbuhannya dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya. Hal ini meliputi penguraian faktor penyebab pertumbuhan berbagai sektor di suatu daerah tetapi dalam kaitannya dengan ekonomi nasional. Ada juga yang menamakan model analisis ini sebagai industrial mix analysis, karena komposisi industri yang ada sangat mempengaruhi laju pertumbuhan wilayah tersebut. Artinya, apakah industri yang berlokasi di wilayah tersebut termasuk ke dalam kelompok industri yang secara nasional memang berkembang pesat dan bahwa industri tersebut cocok berlokasi di wilayah itu atau tidak. Analisis shift-share dapat menggunakan variabel lapangan kerja atau nilai tambah. Akan tetapi, yang terbanyak digunakan adalah variabel lapangan kerja karena datanya lebih mudah diperoleh. Apabila menggunakan nilai tambah maka sebaiknya menggunakan data harga konstan (*Tarigan, 2005*).

Pertambahan lapangan kerja (*employment*) regional total (ΔE_r) dapat diurai menjadi komponen shift dan komponen share. Komponen share sering pula disebut komponen national share. Komponen national share (N) adalah banyaknya pertambahan lapangan kerja regional seandainya proporsi perubahannya sama dengan laju pertambahan nasional selama periode studi. Hal ini dapat dipakai sebagai kriteria bagi daerah yang bersangkutan untuk mengukur apakah daerah itu tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dari pertumbuhan nasional rata-rata.

Komponen "shift" adalah penyimpangan (*deviation*) dari national share dalam pertumbuhan lapangan kerja regional. Penyimpangan ini positif di daerah-daerah yang tumbuh lebih cepat dan negatif di daerah-daerah yang tumbuh lebih lambat merosot dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja secara nasional. Bagi setiap daerah, shift netto dapat dibagi menjadi dua komponen, yaitu proportional shift component (P) dan differential shift component (D).

Proportional shift component (P) kadang-kadang dikenal sebagai komponen struktural atau industrial mix, mengukur besarnya shift regional netto yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor industri di daerah yang bersangkutan. Komponen ini positif di daerah-daerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh cepat dan negatif di daerah-daerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh dengan lambat atau bahkan sedang merosot.

Differential shift component (D) kadang-kadang dinamakan komponen lokasional atau regional adalah sisa kelebihan. Komponen ini mengukur besarnya shift regional netto yang diakibatkan oleh sektor-sektor industri tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di daerah yang bersangkutan daripada tingkat nasional yang disebabkan oleh faktor-faktor lokasional intern. Jadi, suatu daerah yang mempunyai keuntungan lokasional seperti sumber daya yang melimpah/efisien, akan mempunyai differential shift component yang positif, sedangkan daerah yang secara lokasional tidak menguntungkan akan mempunyai komponen yang negatif.

Kedua komponen shift ini memisahkan unsur-unsur pertumbuhan regional yang bersifat ekstern dan yang bersifat intern. Proportional shift adalah akibat dari pengaruh unsur-unsur luar yang bekerja secara nasional, sedangkan differential shift adalah akibat dari pengaruh faktor-faktor yang bekerja khusus di daerah yang bersangkutan.

Untuk mengetahui pergeseran kontribusi (*proportional* dan *differential shift*) dan sumbangannya terhadap sistem perekonomian yang lebih luas (*share*), maka digunakan metode analisis *shift and share*.

Analisis *shift-share* menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang menyebabkan perubahan struktur industri suatu daerah dalam pertumbuhannya dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya. Hal ini meliputi penguraian faktor penyebab pertumbuhan berbagai sektor di suatu daerah tetapi dalam kaitannya dengan ekonomi nasional.

Shift-Share digunakan untuk melihat adanya perubahan kesempatan kerja atau produksi suatu wilayah dan daerah yang disebabkan oleh perubahan kesempatan kerja atau produksi ruang lingkup regional secara umum. Tujuan dari analisis *shift-share* ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan wilayah yang lebih luas (wilayah referensi).

Asumsi menggunakan metode ini adalah bahwa laju perkembangan sosial ekonomi relatif tetap sehingga data yang digunakan dapat diwakili oleh data tahun awal dan data tahun terakhir. Pemilihan metoda pergeseran analisis ini berdasarkan kemampuannya untuk menyelidiki karakteristik pertumbuhan wilayah didalam sistem yang lebih luas (nasional). Dengan demikian diharapkan penggunaan metoda ini akan dapat mengetahui potensi setiap kecamatan dalam pertumbuhan wilayah perencanaan.

Dari hasil analisis shift and share diperoleh gambaran kinerja aktifitas disuatu wilayah sebagai beriku:

a. Perhitungan National Share

Peranan *National Share* adalah seandainya pertambahan PDRB regional sektor i tersebut sama dengan proporsi pertambahan PDRB nasional secara rata-rata.

$$\text{Rumus : } NS_{i,t} = E_{r,i,t-n} \left(\frac{E_{N,t}}{E_{N,t-n}} \right) - E_{r,i,t-n}$$

b. Perhitungan Proportional Share

Proportional Share adalah melihat pengaruh sektor i secara nasional terhadap pertumbuhan PDRB sektor i pada region yang dianalisis, dengan kata lain *proportional share* menunjukkan juga apakah pertumbuhan ekonomi pada sektor tersebut lebih cepat (+) atau lebih lambat (-) daripada pertumbuhan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

$$\text{Rumus : } p_{r,i,t} = \left\{ \left(\frac{E_{N.,i,t}}{E_{N,i,t-n}} \right) - \left(\frac{E_{N,t}}{E_{N,t-n}} \right) \right\} \times E_{r,i,t-n}$$

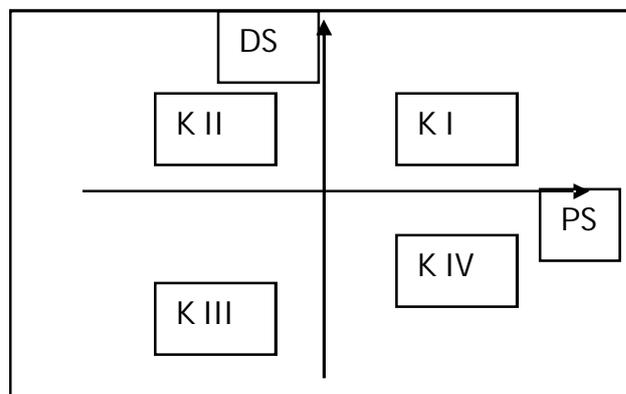
c. Perhitungan Differential Shift

Ukuran ini menjelaskan bagaimana tingkat kompetisi suatu aktivitas/sektor tertentu dibandingkan dengan pertumbuhan total sektor/aktivitas tersebut dalam wilayah. Komponen ini menggambarkan dinamika (keunggulan/ketidakkunggulan) suatu sektor/aktivitas tertentu di sub wilayah tertentu terhadap aktivitas tersebut di sub wilayah lain. Atau untuk membandingkan posisi aktivitas ekonomi lokal/wilayah (kabupaten/kota) terhadap aktivitas ekonomi wilayah yang lebih luas (provinsi) pada sektor yang sama. Differential shift positif menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi pada sektor tersebut adalah kompetitif.

Rumus :



Kombinasi hasil analisis *shift* dan *share* tersebut akan menghasilkan empat indikator, yaitu :



Keterangan :

PS = *Proportional Share*

DS = *Differential Shift*

K = *Kuadran*

Interpretasi :

- K I = Bila nilai *proportional share* dan *differential shift* bernilai positif diartikan bahwa sektor ini mempunyai peranan yang penting dalam

perekonomian kota (kontribusinya cenderung naik) dan naik terhadap sistem perekonomian yang lebih luas (propinsi).

- K II = Bila nilai *proportional share* bernilai negatif dan *differential shift* bernilai positif, artinya sektor ini hanya dapat meningkatkan peranannya dalam lingkup internal (kota).
- K III = Bila nilai *proportional share* bernilai dan *differential shift* bernilai negatif, artinya sektor tersebut tidak mempunyai peranan dalam memajukan perekonomian internal (kota) maupun eksternal (propinsi).
- K IV = Bila nilai *proportional share* bernilai positif dan *differential shift* negatif, berarti sektor tersebut hanya dapat meningkatkan peranannya dalam wilayah yang lebih luas (propinsi), tetapi tidak dapat meningkatkan perekonomian internal (kota).

A. Keunggulan Analisis *Shift – Share*

Keunggulan analisis *Shift – Share* antara lain:

- a. Memberikan gambaran mengenai perubahan struktur ekonomi yang terjadi, walau analisis *Shift – Share* tergolong sederhana.
- b. Memungkinkan seseorang pemula mempelajari struktur perekonomian dengan cepat.
- c. Memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur dengan cukup akurat.

B. Kelemahan Analisis *Shift – Share*

Kelemahan analisis *shift – share* antara lain:

- a. Ada data periode waktu tertentu di tengah tahun pengamatan yang tidak lengkap.
- b. Analisis ini sangat berbahaya sebagai alat peramalan mengingat bahwa regional shift tidak konstan dari suatu periode ke periode lainnya.
- c. Tidak dapat di pakai untuk melihat keterkaitan antar sektor.
- d. Tidak ada keterkaitan antar daerah

2.4 Studi Terdahulu

1. **Anthy Septianti : Studi Penentuan Komoditas Unggulan Sub Sektor Perkebunan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Kabupaten Majalengka, Jurusan Teknik Planologi UNPAS 2007.**

- **Latar Belakang**

Kabupaten Majalengka dengan berbagai sumber daya alam yang ada baik berupa perkebunan rakyat, potensi pertanian maupun sumber daya hutannya, merupakan kawasan yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan pengembangan ekonomi terpadu terutama sebagai pengembangan Agribisnis di Propinsi Jawa Barat. Keunggulan pengembangan perkebunan di Kabupaten Majalengka meliputi ; a) memiliki akses (kedekatan jarak) dengan pelabuhan Cirebon (merupakan sentral kegiatan ekspor dan import) sehingga pergerakan yang terjadi akan lebih cepat dan minimasi biaya transportasi dapat terjadi; b) dukungan kebijakan pada Kawasan Andalan Ciayumajakuning dimana memposisikan zona komoditas unggulan sebagai prioritas pada pengembangan agrobisnis; c) adanya rencana dibangunnya bandara internasional yang terletak di Kecamatan Jatitujuh sehingga hasil produksi komoditas unggulan perkebunan dapat dipasarkan keluar daerah bahkan keluar negeri.

- **Tujuan**

Tujuan dari studi ini adalah menentukan komoditas unggulan sub sektor perkebunan dalam rangka pengembangan wilayah Kabupaten Majalengka.

- **Metode Analisis**

Metode yang dipergunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini meliputi beberapa jenis diantaranya : metode pengumpulan data sekunder, perhitungan menggunakan metode yang berkaitan dengan kajian sosial ekonomi, diantaranya perhitungan sektor basis (*Location Quotient*), analisis pergeseran (*Shift-Share*), penyerapan tenaga kerja (*regional employment multiplier*) dan analisis kesesuaian lahan (*Overlay*) dan metode analisis deskriptif kualitatif.

- **Kesimpulan**

Berdasarkan perhitungan dari analisis-analisis yang mempergunakan berbagai macam metoda analisis seperti analisis kontribusi hasil produksi, LQ, *Shift Share*, Penyerapan Tenaga Kerja (*Regional Employment Multiplier*) maka dapat disimpulkan sebagai berikut : komoditas unggulan sub sektor perkebunan di Kabupaten Majalengka berdasarkan kemampuan memberikan kontribusi hasil produksi perkebunan adalah komoditas tebu (42,41%), tembakau (11,44%) dan jahe (11,77%) karena komoditas tersebut memberikan kontribusi hasil produksi yang besar terhadap total hasil produksi sub sektor perkebunan. Komoditas yang

mempu diekspor keluar wilayah (komoditas basis) adalah komoditas yang berdasarkan hasil analisis LQ komoditas-komoditas sub sektor perkebunan tersebut memiliki nilai $LQ > 1$. Adapun komoditas-komoditas tersebut ialah kelapa hibrida dengan nilai $LQ = 1,29$, kopi dengan nilai $LQ = 1,46$, cengkeh dengan nilai $LQ = 1,47$, tembakau dengan nilai $LQ = 7,69$, lada dengan nilai $LQ = 7,62$, kapok dengan nilai $LQ = 5,86$, aren dengan nilai $LQ = 7,25$, jahe dengan nilai $LQ = 7,01$, tebu dengan nilai $LQ = 1,42$ dan melinjo dengan nilai $LQ = 1,93$.

2. Endang Hadiansyah : Strategi Pengembangan Sektor Perkebunan Di Kabupaten Cianjur, Jurusan Teknik Planologi UNPAS 2004.

• Latar Belakang

Keunggulan pengembangan perkebunan di Kabupaten Cianjur meliputi ; a) memiliki akses (kedekatan jarak) dengan Pelabuhan Tanjung Priuk (merupakan sentral kegiatan ekspor dan import), sehingga pergerakan yang terjadi dapat lebih cepat apabila dibandingkan dengan Sukabumi, Garut, Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, dll, dan minimasi biaya transportasi dapat terjadi; b) dukungan kebijakan pada Kawasan Andalan Bopunjur dimana sektor unggulan adalah perkebunan, c) daya dukung lahan yang cukup tinggi, tercatat hampir seluruh lahan mampu mendukung pengembangan kegiatan perkebunan, berbeda dengan bogor, dimana proporsi kontribusi perkebunan hanya 4,55% (dibawah Cianjur 6,87%).

• Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah strategi pengembangan sektor perkebunan yang didasarkan pada potensi dan prospek pengembangan sektor perkebunan di Kabupaten Cianjur.

• Metode Analisis

Dalam strategi pengembangan sektor perkebunan di Kabupaten Cianjur, langkah-langkah analisis yang digunakan meliputi : analisis spesialisasi ruang, analisis daya dukung lingkungan, analisis kependudukan dan tenaga kerja, analisis optimasi dari potensi tenaga kerja dan penggunaan lahan perkebunan guna mendukung PDRB (atau pendapatan per kapita) yang maksimal, adapun model analisis yang digunakan adalah program linear.

• Kesimpulan

Didalam mendukung strategi keruangan yang telah dijelaskan diatas, maka dibutuhkan dukungan strategi sektoral, yang didasarkan pada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sektor perkebunan di Kabupaten Cianjur. Sementara itu, strategi sektoral meliputi : memperkuat dan memperluas jaringan pemasaran dalam negeri maupun luar negeri, menawarkan peluang pengembangan agroindustri dan terminal perkebunan (perusahaan pengumpul dan distribusi), melalui media masa tertentu seperti koran, televisi, radio, seminar-seminar terbuka, dan lain-lain, dalam rangka menarik para calon investor, penurunan harga bibit, pupuk dan obat-obatan bagi pengembangan perkebunan, memutus mata rantai tengkulak dalam rangka menciptakan kondisi harga komoditas yang optimal, pengembangan pendidikan dan pelatihan dan pembentukan organisasi kelembagaan baik formal maupun non formal bagi pengembangan kualitas dan kesejahteraan petani, perbaikan dan pembangunan irigasi dalam rangka memberikan akses dan menciptakan tarikan dalam pembukaan lahan baru untuk kegiatan perkebunan, mempermudah dalam mekanisme mendapatkan perijinan (ijin usaha dan lain-lain), pengembangan Lembaga Keuangan dan Koperasi dalam rangka memberikan suntikan dana untuk kegiatan pengembangan sektor perkebunan.

3. Jonathan Gultom : Studi Identifikasi Sektor Ekonomi Unggulan Dalam Pengembangan Wilayah Kota Bandar Lampung, Jurusan Teknik Planologi ITB 2006

• Latar Belakang

Berdasarkan RTRW Kota Bandar Lampung 2005-2015, perekonomian kota Bandar Lampung di arahkan untuk bertumbuh pada sektor perekonomian perkotaan, yaitu sektor industri, sektor perdagangan dan jasa. Apabila di lihat dari kontribusi ketiga sektor tersebut terhadap PDRB kota Bandar Lampung, sektor perekonomian perkotaan memang memiliki kontribusi terbesar, maka muncul pertanyaan yaitu apakah sektor perekonomian perkotaan merupakan sektor unggulan yang tepat untuk dijadikan tulang punggung perekonomian kota Bandar Lampung yang sesuai dengan kebijakan pemerintahan daerah kota Bandar Lampung. Maka dari itu untuk memahami sektor-sektor ekonomi unggulan di kota Bandar Lampung, dibutuhkan suatu studi yang bertujuan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan kota Bandar Lampung.

- **Tujuan**

Sasaran yang diharapkan dapat membantu mencapai tujuan penelitian yaitu :

- Mengidentifikasi struktur perekonomian kota Bandar Lampung secara makro
- Mengidentifikasi sektor ekonomi kota Bandar Lampung yang merupakan sektor basis
- Mengidentifikasi sektor ekonomi kota Bandar Lampung yang memiliki keunggulan lokasional
- Mengidentifikasi keterkaitan antar sektor ekonomi yang ada di kota Bandar Lampung
- Menentukan sektor ekonomi unggulan berdasarkan indikator yang ditetapkan
- Mengidentifikasi arahan rencana pengembangan perekonomian kota Bandar Lampung

- **Metode Analisis**

Metode yang dipergunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini meliputi beberapa jenis diantaranya : metode pengumpulan data sekunder, perhitungan menggunakan metode yang berkaitan dengan kajian sosial ekonomi, diantaranya perhitungan sektor basis (*Location Quotient*), analisis pergeseran (*Shift-Share*), sedangkan untuk menentukan keterkaitan antar sektor dan memilih sektor yang memiliki dampak pengembangan positif bagi sektor lain digunakan metode analisis *input-output*.

- **Kesimpulan**

Yang menjadi sektor unggulan ekonomi di kota Bandar Lampung yaitu sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB kota Bandar Lampung, adalah keberadaan pulau panjang, yang menjadi sarana vital penghubung pulau Sumatera dan pulau Jawa, bahkan dengan perdagangan dunia. Pelabuhan panjang dapat dijadikan salah satu prasarana unggulan di Kota Bandar Lampung, untuk menciptakan kawasan industri terpadu di kota Bandar Lampung.

4. Epina Cornely : Strategi pengembangan wilayah melalui kebijakan pengembangan pasar dan pemasaran komoditas unggulan karet dan kopi di kabupaten Muara Enim, Jurusan Teknik Planologi ITB, 2003

- **Latar Belakang**

Muara Enim digolongkan sebagai wilayah "kaya" bahkan dalam lingkup wilayah Propinsi Sumatera Selatan dan berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi

regional. Pendapatan per kapitanya tinggi karena peran sektor tambang, minyak dan gas bumi. Persoalan wilayah ini adalah kemakmuran wilayahnya tidak memberikan kemakmuran bagi sebagian besar penduduknya. Mayoritas penduduknya berada di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan rendah. Sektor ekonomi terbesarnya (tambang, minyak dan gas bumi) tidak melibatkan banyak penduduk dalam proses produksinya. Sebagian besar penduduk adalah petani perkebunan rakyat.

- **Tujuan**

Pertama, menghasilkan gambaran kondisi struktur perekonomian wilayah dan kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi dan prospek di masa datang. Kedua, menghasilkan gambaran kondisi pasar (market) dari komoditas unggulan terpilih di tingkat dunia, nasional dan regional. Ketiga, menghasilkan gambaran kondisi tataniaga/pemasaran (marketing) komoditas unggulan.

- **Metode Analisis**

Metode analisis deskripsi dan eksplanatori digunakan untuk mengetahui gambaran struktur perekonomian wilayah, metode analisis deskripsi dan eksplorasi digunakan untuk menghasilkan gambaran kondisi pasar (market) komoditas unggulan dan metode analisis deskripsi, ekplanatori dan eksplorasi digunakan untuk mengetahui gambaran kondisi pemasaran/tataniaga (marketing) komoditas unggulan.

- **Kesimpulan**

Pertama, komoditas kopi dan karet bukan merupakan komoditas unggulan, Kedua, pasar (market) komoditas kopi dari karet sampai saat ini masih over supply sehingga harga jual sangat rendah di tingkat petani. Ketiga, tataniaga/pemasaran (marketing) komoditas kopi dan karet belum efisien dengan kondisi tingkat keuntungan petani yang relatif belum tinggi. Untuk mengurangi keterbatasan dan meningkatkan peran karet dan kopi dalam perekonomian wilayah diusulkan strategi: Pertama, strategi pasar (market strategy), yaitu mengubah komoditas bahan mentah menjadi produk olahan, dan melakukan ekspansi pasar.

